

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

Sertifikat Lahan PRPP Akhirnya di Tangan Pemprov

SEMARANG - Setelah melewati proses panjang, delapan tahun, aset lahan di lokasi Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah kini benar-benar dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menyusul dikabulkannya upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo oleh Mahkamah Agung. Selain itu, penyerahan sertifikat hak pengelolaan (HPL) lahan PRPP dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Pemprov.

Sengketa lahan PRPP antara Pemprov Jateng dan PT Indo Perkasa Usahatama (PT IPU) dimulai cukup lama, yakni sejak kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo, tepatnya pada 2011.

Sengketa berakhir dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 790/PK/PDT/2018 tertanggal 23 Januari 2019.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Majelis hakim yang dipimpin Takdir Rahmadi mengabulkan permohonan PK yang diajukan Gubernur Jateng dan PT PRPP sekaligus membatalkan putusan Mahkamah Agung No 2587 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang penolakan permohonan kasasi Gubernur dalam persidangan sebelumnya.

Dalam pokok perkara, hakim menyatakan gugatan penggugat (PT IPU) tidak dapat diterima (*niet ontvanke-lijk verklaard*).

Atas putusan yang memenangkan Pemprov Jateng, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang menerbitkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) PRPP. Sebanyak delapan sertifikat baru diterbitkan dan diserahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jateng Jonahar kepada Gubernur Ganjar Pranowo.

"Dasar kami mengeluarkan sertifikat baru itu adalah putusan MA. Karena semua sudah *clear*, maka kami terbitkan sertifikat HPL," kata Jonahar saat menyerahkan sertifikat kepada Gubernur Jateng, Rabu (7/8).

Sertifikat HPL baru tersebut disambut baik oleh Ganjar. Dirinya mengatakan, butuh perjuangan panjang untuk merebut kembali aset PRPP tersebut.

"Lebih dari enam tahun. Setelah kami berjuang untuk menyelamatkan aset negara, Alhamdulillah sekarang sudah kembali. Dengan putusan MA yang mengabulkan PK kami, BPN menindaklanjuti dengan cukup cepat. Sekarang, sertifikat pengganti HPL sudah terbit dan diserahkan ke kami," kata Ganjar.

Selanjutnya, Pemprov telah menyiapkan proyek besar untuk pengembangan kawasan PRPP. Nantinya, di lokasi tersebut akan dibangun *exhibition hall*, hotel dan tempat hiburan yang bagus serta representatif. "Terlebih lokasinya dekat bandara," terangnya.

Sebenarnya, lanjut dia, sudah ada sejumlah calon investor yang berminat mengembangkan PRPP sejak lama. Namun selama ini, mereka urung melanjutkan investasi karena terkendala sengketa lahan.

"Sekarang saat yang tepat. Saya minta pengelola PRPP untuk mengundang lagi calon-calon investor dan dilakukan pembangunan. Kalau sekarang sudah dimulai, tahun 2022 proyek sudah selesai," tegasnya.

Semarang, menurutnya, merupakan kota pertama yang memiliki ekspedisi ekspor dagang terbesar di dunia pada zaman penjajahan Belanda. Ganjar ingin kembali mengembalikan kejayaan itu dengan membangun *exhibition hall* di PRPP.

"Saya ingin suatu ketika itu terjadi lagi, dimulai dari PRPP," tandasnya. (H81-41)